

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejarah perumusan Pancasila Dasar Negara erat sekali hubungannya dengan sidang (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) BPUPK yang pertama, sedang pengesahannya berkaitan sangat erat dengan pengesahan Pembukaan UUD 1945 oleh (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) PPKI. Adapun rumusan-rumusan yang pernah ada dalam dokumen sejarah, yaitu rumusan yang pertama dari rumusan Mohammad Yamin, pada tanggal 19 Mei 1945 dan rumusan Mohammad Yamin yang kedua, pada tanggal 29 Mei 1945 disampaikan dalam pidatonya tentang rancangan pembukaan hukum dasar, rumusan yang ketiga dari rumusan Ir. Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan yang keempat dari rumusan Piagam Jakarta, pada tanggal 22 Juni 1945, rumusan yang kelima dari rumusan Pembukaan UUD 1945, 18 Agustus 1945, rumusan yang keenam dari rumusan Mukadimah Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950, dan rumusan yang ketujuh dari rumusan lain (Sugito dkk., 1991: 85).

Menurut Notosusanto (1991: 87), memberikan pedoman analisis tentang persoalan hari lahirnya Pancasila, dalam kronologi penggalan/perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara melalui sidang (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) BPUPK, dengan sidang yang pertama, tanggal 29 Mei 1945 pidato Mohammad Yamin, sidang yang kedua, tanggal 31 Mei 1945 pidato Soepomo, serta yang ketiga, tanggal 1 Juni 1945 pidato Soekarno dan

mengusulkan nama Pancasila dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa. Sedangkan, menurut B.J. Boland dalam buku yang ditulis oleh Endang Saifuddin pada tahun 1997 halaman 18 bahwa atas dasar kesamaan lima asas Yamin dan lima sila Soekarno, jumlah prinsip atau dasar sama-sama lima dan sama panjang pidatonya yaitu, dua puluh halaman, maka berkesimpulan bahwa *Pancasila itu ternyata karya Yamin, dan bukan karya Soekarno.*

Perumusan Dasar Negara Indonesia, persidangan (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) BPUPK untuk merumuskan Undang-Undang Dasar diawali dengan pembahasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Untuk itulah pada kata pembukaannya, ketua (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) BPUPK dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat meminta pandangan para anggota mengenai konsep dasar negara Indonesia Merdeka. Tokoh yang pertama kali mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan rumusan dasar negara adalah Mohammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dua hari kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Soepomo mengajukan dasar negara Indonesia. Keesokan harinya pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengemukakan pidatonya dan memberikan usulan mengenai nama bagi dasar negara, yaitu Pancasila, Trisila, atau Ekasila. Pada tanggal 22 Juni 1945 terbentuk panitia 9 dengan rumusan Piagam Jakarta. Pada sidang kedua (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) BPUPK tanggal 14 Juli 1945 menghasilkan: pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar (Batang Tubuh) (Mustopo dkk., 2011: 4-5).

Sidang (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) BPUPK dilakukan dua tahap, tahap pertama berlangsung pada 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada pidato sidang (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) BPUPK, Radjiman menyampaikan pokok persoalan mengenai Dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10-11 Juni 1945, dibahas dan dirumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Dalam kata pembukaannya Radjiman meminta pandangan kepada para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Orang-orang yang membahas mengenai dasar negara adalah Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno (Balitbang, 2014: 60).

Dalam sidang pertama, Soekarno mendapat kesempatan berbicara dua kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945. Namun, pada saat itu seperti apa yang disampaikan oleh Radjiman, selama dua hari berlangsung rapat, belum ada yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Menanggapi hal itu, pada tanggal 1 Juni pukul 11.00 WIB, Soekarno menyampaikan pidato pentingnya. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan tentang dasar-dasar negara. Pada mulanya Soekarno mengusulkan Panca Dharma. Nama Panca Dharma dianggap tidak tepat, karena Dharma berarti kewajiban, sedangkan yang dimaksudkan adalah dasar. Soekarno kemudian meminta saran pada seorang teman, yaitu Mohammad Yamin yang merupakan ahli bahasa, selanjutnya dinamakan Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itu didirikan Negara Indonesia, supaya kekal dan abadi. Pada kesempatan tersebut, Ir. Sukarno juga menjadi pembicara kedua. Ia mengemukakan tentang lima dasar negara. Lima dasar itu adalah (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Peri

Kemanusiaan, (3) Mufakat atau Demokrasi, (4) Kesejahteraan Sosial, (5) Ketuhanan Yang Maha Esa. Pidato itu kemudian dikenal dengan Pancasila. Sementara itu, Mohammad Yamin dalam pidatonya juga mengemukakan Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Menurut Yamin, ada lima azas, yaitu (1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusiaan, (3) Peri Ketuhanan, (4) Peri Kerakyatan, dan (5) Kesejahteraan Rakyat (Balitbang, 2014: 61).

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perbandingan sejarah lahirnya Pancasila yang ditemukan dibuku teks pelajaran sejarah untuk SMA pada kurikulum KTSP 2006 untuk Program IPS kelas XII dan Kurikulum 2013 SMA/MA/SMK/MAK untuk kelas XI. Penelitian ini didorong oleh kekhawatiran dari kecenderungan penurunan identitas nasional dikalangan masyarakat Indonesia, terutama kaum muda. Melalui penelitian ini, maka akan diperoleh pemahaman tentang buku teks pelajaran sejarah materi lahirnya Pancasila yang merekonstruksi identitas nasional pada buku pelajaran sejarah yang digunakan oleh siswa SMA. Hal ini perlu dilakukan, untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam tiap-tiap sila Pancasila.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana lahirnya Pancasila yang dinarasikan dalam buku teks pelajaran Sejarah KTSP 2006 dan Kurikulum 2013?

2. Siapakah tokoh-tokoh dalam perumusan Pancasila yang dinarasikan dalam buku teks pelajaran Sejarah KTSP 2006 dan Kurikulum 2013?
3. Bagaimana proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara yang dinarasikan dalam buku teks pelajaran Sejarah KTSP 2006 dan Kurikulum 2013?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini bermaksud untuk memaparkan:

1. Lahirnya Pancasila yang dinarasikan dalam buku teks pelajaran Sejarah KTSP 2006 dan Kurikulum 2013.
2. Tokoh-tokoh dalam perumusan Pancasila yang dinarasikan dalam buku teks pelajaran Sejarah KTSP 2006 dan Kurikulum 2013.
3. Proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara yang dinarasikan dalam buku teks pelajaran Sejarah KTSP 2006 dan Kurikulum 2013.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoretis**

Dengan adanya penelitian ini, maka dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu sejarah, memberi masukan bagi penelitian berikutnya bahwa buku teks pelajaran sejarah merupakan salah satu karya historiografi yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan. Sejarah sebagai alat pendidikan akan dipengaruhi oleh tujuan pendidikan khususnya tujuan mata pelajaran sejarah yang tertuang dalam kurikulum. Hal itu, dapat dijadikan

sebagai referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan sejarah lahirnya Pancasila.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat:

### **a. Siswa**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi siswa maupun pembaca lainnya untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pengetahuan sejarah dan dapat mengetahui sejarah lahirnya Pancasila melalui buku teks pelajaran sejarah untuk SMA pada kurikulum KTSP 2006 untuk Program IPS kelas XII dan Kurikulum 2013 SMA/MA/SMK/MAK untuk kelas XI sebagai media yang penting untuk menanamkan identitas nasional bangsa Indonesia.

### **b. Guru**

Buku teks pelajaran sejarah memiliki arti penting bagi guru. Buku teks pelajaran sejarah dapat berfungsi sebagai sumber belajar dan mengajar sejarah media, karena di dalamnya ada materi, ilustrasi, dan berbagai evaluasi, sehingga tujuan pembelajaran sejarah dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, melalui penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para guru sejarah maupun guru mata pelajaran lainnya mengenai sejarah lahirnya Pancasila yang diajarkan untuk para siswa agar tidak ada lagi kesalahan dalam penyampaian materi sejarah lahirnya Pancasila.

## E. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Relevan

### 1. Tinjauan Pustaka

#### a. Lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara

Istilah Pancasila sudah dikenal sejak jaman Majapahit yang ditulis dalam buku Sotasoma karangan Empu Tantular. Di dalam buku Sotasoma istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang lima (dari bahasa Sansekerta) juga mempunyai arti pelaksanaan Kesusilaan yang lima (Pancasila Krama) yaitu, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk minuman keras. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menggunakan istilah Pancasila untuk memberi nama dasar negara. Istilah tersebut dipakai oleh Bung Karno atas nasehat dari temannya yang ahli bahasa. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, sewaktu sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berhasil mengesahkan rencana Hukum Dasar yang di dalamnya mengandung Pembukaan yang memuat rumusan Dasar Negara Republik Indonesia yang diberi nama Pancasila. Sedangkan, rencana Hukum Dasar itu kemudian disahkan dengan beberapa perubahan diberi nama Undang-Undang Dasar (Daroeso dkk., 1991: 23-24).

Istilah Pancasila sebagai *Weltanschauung* dan dasar negara telah kita dengar untuk pertama kali waktu Soekarno memberikan pidato sambutannya pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan isi hakikinya tertuang dalam teks resmi Pembukaan UUD 1945. Ini berarti, bahwa tanpa spesifikasi lain, tiap ucapan istilah Pancasila diartikan mengacu pada Pembukaan UUD 1945. Dari konteks Pembukaan UUD 1945 ini, jelaslah bahwa fungsi dasar Pancasila ialah sebagai dasar negara (Soerjanto, 1989: 4).

#### **b. Buku Teks Sejarah**

Mata pelajaran sejarah memiliki arti yang strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Mata pelajaran sejarah berusaha menanamkan nilai-nilai kurikulum mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat dari masa lampau hingga kini. Dengan demikian, diharapkan dapat memberi penyadaran pada siswa terhadap adanya proses perubahan dan perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan membangun kesadaran sejarah dalam memahami, dan menjelaskan jati diri bangsa di masa lampau, masa kini, dan masa depan ditengah-tengah perubahan dunia (Mustopo dkk., 2011: iii).

Buku teks pelajaran sejarah nasional Indonesia untuk SMA merupakan salah satu karya historiografi yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan. Sejarah sebagai alat pendidikan akan dipengaruhi oleh tujuan pendidikan, khususnya tujuan mata pelajaran sejarah yang tertuang dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum memiliki

salah satu landasan penting yaitu landasan politik. Landasan politik yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah. Pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Landasan politik pendidikan memiliki implikasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Praktik pendidikan di Indonesia berubah-ubah seiring dengan perubahan kebijakan politik yang diambil pemerintah di berbagai masa pemerintahannya. Dimulai dari pelaksanaan pendidikan pada masa penjajahan hingga kini pada masa reformasi. Penyusunan materi sejarah dalam buku teks sejarah nasional Indonesia tidak lepas dari pengaruh kebijakan politik pemerintah. Salah satu pengaruh terhadap buku teks tersebut adalah adanya ideologisasi (Mulyana, 2013: 1).

### c. Pengertian Pancasila

Secara historis istilah *Pancasila* mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Budha. Pancasila berarti *lima aturan* yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa agama Budha, yang dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Pali *Panca-Sila*, yang berisi lima larangan atau lima pantangan. Jadi, pertama kali istilah *Pancasila* digunakan untuk memberi nama rumusan lima dasar moral dalam agama Budha (Bakry, 1997: 9).

Secara harafiah atau etimologis *Pancasila* berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya, Panca berarti batu sendi, alas atau dasar. Sehingga, Pancasila mempunyai arti lima dasar, sedangkan sila sendiri sering diartikan kesusilaan atau peraturan tingkah laku yang baik. Dengan

demikian, Pancasila dapat juga diartikan, lima dasar kesusilaan atau lima dasar peraturan tingkah laku yang baik (Bambang dkk., 1991: 23).

Secara Terminologis atau berdasarkan istilahnya yang digunakan di Indonesia, dimulai sejak sidang (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada tanggal 1 Juni 1945. Istilah “Pancasila” dipergunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama pada lima dasar atau lima prinsip negara Indonesia Merdeka yang diusulkannya. Sedangkan, istilah tersebut, menurut Bung Karno sendiri adalah dibisikkan dari temannya seorang ahli bahasa (Bakry, 1997: 11).

Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang lahir dan tumbuh dari sejarah dan kebudayaan kita yang telah berabad-abad lamanya. Suatu kebudayaan yang menampakkan keselarasan sebagai kunci dari kebahagiaan manusia. Ialah suatu kebudayaan yang didasarkan pada kesadaran bahwa pada akhirnya kebahagiaan manusia tergantung pada tercapainya keselarasan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan alam, antara manusia dengan masyarakatnya, antara kemajuan kehidupan lahiriah dan kehidupan rokhaniah (Sugito dkk., 1991: 78).

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga masyarakat, karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang

dirintis sejak jaman Sriwijaya hingga Sumpah Pemuda 1928. Kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara ini serta, disepakati dan ditentukan sebagai dasar negara Republik Indonesia.

## F. Penelitian Relevan

Penelitian tentang sejarah lahirnya Pancasila dalam buku teks pelajaran sejarah sejauh pengamatan peneliti belum pernah dilakukan. Untuk inilah, peneliti mencoba mengungkap tentang *Buku Teks Pelajaran Sejarah Materi Lahirnya Pancasila*. Penelitian ini menunjuk pada beberapa tinjauan pustaka yang peneliti gunakan, tinjauan pustaka tersebut terdiri dari penelitian yang berkaitan dengan analisis materi buku teks pelajaran sejarah yang sudah ada diantaranya yaitu:

Jurnal yang ditulis oleh Tri Widodo dengan judul *Memahami Makna Praksis Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah Kontroversial* membahas tentang banyak peristiwa sejarah di negeri ini yang masih sarat dengan kontroversi, untuk menyebut beberapa diantaranya; peristiwa G 30 S, peristiwa seputar Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Serangan Umum 1 Maret 1949, Lahirnya Pancasila, Lahirnya Orde Baru, dan Integrasi Timor-Timur. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka hendaknya pembelajaran sejarah jangan hanya sebatas narasi yang bersifat “metanaratif”, sejarah harus menjadi narasi yang historistik yang bertumpu pada hari ini dalam kehidupan siswa. Metodenya adalah dengan berkisah tentang masa lalu dan berproyeksi ke masa depan, sebab dimensi waktu dalam sejarah adalah bukan hanya waktu lalu.

Jurnal yang ditulis oleh Agus Mulyana dengan judul *Nasionalisme Dan Militerisme: Ideologisasi Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA* membahas tentang sebagaimana lazimnya karya historiografi buku teks Sejarah Nasional harus mengikuti kaidah-kaidah ilmu sejarah, yaitu rekonstruksi atas sumber-sumber sejarah diinterpretasi secara objektif dan akademik. Interpretasi sejarah nasional sebagaimana yang digambarkan dalam buku teks sejarah nasional Indonesia untuk SMA dipengaruhi oleh pemerintah. Kurikulum merupakan salah satu bagian dari kebijakan politik dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, pemilihan materi dan rekonstruksi sumber-sumber sejarah dalam bentuk interpretasinya akan dipengaruhi oleh faktor politik dari pemerintah.

Dalam buku yang ditulis oleh David Bouchier berjudul *Pancasila Versi Orde Baru* membahas tentang pembentukan kembali Pancasila, tekanannya adalah kembali pada yang asli, bukan hanya nilai-nilai 1945 tetapi pada akar-akar kebudayaan Indonesia. Meskipun Soekarno juga telah mengaitkan Pancasila ke belakang dengan pengertian kolektivis dari tradisi, gambaran Orde Baru tentang keaslian sangat berbeda dengan gambaran tentang keaslian dari presiden yang pertama. Di bawah Orde Baru, Pancasila dipaksa berfungsi sebagai prinsip penuntun bukan hanya untuk wacana ideologis tetapi juga untuk keseluruhan kehidupan bernegara.

Jurnal yang ditulis oleh Hieronymus Purwanta dengan judul *Militer Dan Konstruksi Identitas Nasional: Analisis Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Masa Orde Baru* membahas tentang buku teks pelajaran sejarah SMA periode kurikulum 1975-1994. Pengaruh militer dilakukan dengan menonjolkan

peristiwa-peristiwa historis periode revolusi kemerdekaan yang merepresentasikan konflik fisik. Penonjolan peran militer dalam sejarah revolusi kemerdekaan dilakukan bersamaan dengan peminggiran peran sipil, baik dengan jalan negasi maupun distorsi. Dengan wacana militeristik itu, akan mengembangkan karakter generasi muda yang memuja kekerasan sebagai jalan untuk memperoleh kebenaran.

Dari penelitian-penelitian yang relevan ini, memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas mengenai Pancasila dan buku teks Pelajaran Sejarah, seperti analisis buku pelajaran sejarah masa Orde Baru dan kurikulum pembelajaran sejarah. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian yang lainnya. Hal ini, karena dalam penelitian lainnya sejarah lahirnya Pancasila tidak dibahas dalam narasi buku teks pelajaran sejarah, sedangkan dalam penelitian ini mencakup sejarah lahirnya Pancasila dalam buku teks pelajaran sejarah.

## **G. Kajian Teori dan Pendekatan**

### **1. Kajian Teoretis**

Teori hegemoni sebagai kerangka acuan penelitian empiris. Dalam penelitian ini, teori hegemoni beranggapan bahwa, sosialisasi politik diarahkan oleh kelompok kekuatan politik yang dominan. Dalam teori ini, kelompok yang berkuasa mengarahkan kelompok yang dikuasai sesuai dengan keinginan yang sedang berkuasa. Sosialisasi politik diarahkan untuk kepentingan kelompok yang sedang berkuasa, bukan untuk kepentingan sistem politik yang ideal (Sunarso, 2007: 25).

Hegemoni menurut Gramsci adalah kondisi sosial dalam semua aspek kenyataan sosial yang didominasi atau disokong oleh kelas tertentu. Keberhasilan hegemoni ditentukan oleh terciptanya kesepakatan. Jelaslah kiranya bahwa, kesepakatan tersebut melalui proses belajar. Dengan demikian, dalam pandangan Gramsci, hegemoni adalah hubungan edukasional (*educational relationship*). Hubungan edukasional inilah yang membentuk Civil Society yang di dalamnya terletak dasar dari kekuasaan. Di sinilah terletak peran lembaga-lembaga sosial ideologis, seperti hukum, pendidikan, mass media, agama, dan lain-lain. Dilihat dari segi ini, lembaga-lembaga sosial seperti sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya tidak netral, tetapi merupakan perekat dari hegemoni dalam masyarakat, atau dengan kata lain secara intern terikat pada interes dari kelompok sosial yang berkuasa. Tentunya, dalam hal ini kelompok borjuasi. Sebagai kesimpulan, Gramsci melihat pendidikan dan pengembangan kebudayaan dapat merupakan langkah-langkah bagi perlawanan suatu hegemoni. Perang posisi dan bukan revolusi yang dapat mengubah masyarakat (Tilaar, 2009: 138-139).

Kajian menggunakan teori hegemoni dirasa dapat memberikan gambaran tentang, bagaimana pengaruh kekuasaan politik dalam berbagai aspek pemerintahan, seperti halnya pada aspek pendidikan. Dalam penerapan kurikulum pendidikan di Indonesia sering terjadi beberapa perubahan kurikulum, hal ini terjadi akibat pergantian masa kekuasaan politik yang sedang berkuasa. Pada pergantian kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013 juga mengalami perubahan yang cukup signifikan, seperti pada pembelajaran

sejarah untuk SMA materi sejarah lahirnya Pancasila juga terdapat perbedaan uraian penyampaian materi dalam bahan ajar kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013.

## 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan Pendidikan, dan peneliti memakai Pendekatan Pendidikan Reduksionisme. Dalam pandangan pendekatan reduksionisme, berusaha menyederhanakan konsep pendidikan (reduksi) sehingga, dapat mudah dipahami konsep pandangan yang ingin ditandaskan. Menurut Tilaar, pendekatan reduksionisme mencakup teori pendekatan sosiologis, mengintrodusir bahwa hakikat pendidikan adalah diarahkan pada kepentingan hidup bersama dalam masyarakat. Dengan demikian, identifikasi kebutuhan masyarakat menjadi sangat esensial dalam perumusan materi pelajaran di sekolah sebab, sekolah diorientasikan pada kepentingan masyarakat (*orientation society*) (Tilaar, 1999: 19-32).

## H. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian sejarah, karena di dalamnya terdapat unsur manusia, ruang dan waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Buku Teks Pelajaran Sejarah Materi Lahirnya Pancasila ini adalah metode penelitian sejarah. Peneliti menggunakan penelitian dari berbagai kajian pustaka untuk mendapat data yang diperlukan. Kemudian, diuji kebenarannya agar mendapat data yang valid. Peneliti menggunakan penelitian

dari berbagai kajian pustaka yang terkait dengan sejarah lahirnya Pancasila dan buku teks pelajaran sejarah kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013 tingkat SMA/SMK/MA/MAK.

Metode penelitian sejarah meliputi, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, penulisan sejarah (historiografi).

### **1. Pengumpulan Sumber (Heuristik)**

Langkah pertama dalam metode penelitian sejarah adalah melakukan pengumpulan sumber atau data sejarah dalam bentuk sumber tertulis (dokumenter), sumber sejarah lisan (untuk data sejarah kontemporer), folklor (tradisi lisan), benda dan bangunan (*artifact*). Bahan dokumenter meliputi, otobiografi (dan biografi), surat-surat pribadi, catatan, atau buku harian, atau memoirs, surat kabar, dokumen pemerintah (arsip) (Lohanda, 1998: 5-13), cerita roman (naskah kuno, *manuscript*, *handschrift*), (Kartodirdjo, 1982: 96-122) (Priyadi, 2011: 79).

Heuristik merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Tahap heuristik ini banyak menyita waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan juga perasaan. Oleh sebab itu, lebih dahulu menggunakan kemampuan bagaimana mendapatkan bahan-bahan dalam mencari sumber-sumber sejarah (Sjamsuddin, 2007: 86).

### **2. Kritik Sumber (Verifikasi)**

Verifikasi pada penelitian sejarah identik dengan kritik sumber, yaitu kritik ekstern yang mencari otentisitas atau keotentikan (keaslian) sumber dan

kritik intern yang menilai apakah sumber itu memiliki kredibilitas (kebiasaan untuk dipercaya) atau tidak. Jika kritik ekstern diberlakukan pada sumber tertulis, maka pertama-tama harus diperhatikan bahan yang dipakai, misalnya batu atau logam (prasasti), kertas (arsip atau manuskrip), jenis tinta, dan gaya huruf itu sezaman dengan peristiwa atau tidak. Kritik internal dilakukan dengan memperhatikan dua hal (1) penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber, (2) membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber agar sumber dapat dipercaya (diterima kredibilitasnya) (Priyadi, 2011: 75, 81).

Ketika seseorang mendengar banyak penuturan yang terlihat bersimpang siur akan pusing dalam menentukan kebenarannya. Orang akan gelisah manakala ia menghadapi versi-versi yang muncul dalam wawancara karena suatu yang bersifat lisan memang tidak mantap. Lidah yang tidak bertulang itu bisa berubah-ubah kesaksiannya. Perubahan seperti itu juga menjadi masalah tersendiri bagi sejarawan yang tidak terbiasa menghadapi versi-versi, yang juga bervariasi. Justru, ketika kesaksian itu, berbeda versinya, sejarawan sedang menghadapi pula subjektivitas dari masing-masing pelaku. Perbedaan versi memungkinkan sejarawan untuk melakukan verifikasi atau kritik sumber (Priyadi, 2014: 95).

Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu, pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam metode sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal ialah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan,

atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak. Sedangkan, kritik internal kebalikan dari kritik eksternal, kritik internal sebagaimana yang disarankan oleh istilahnya menekankan aspek “dalam” yaitu *isidari* sumber; kesaksian (*testimoni*). Setelah fakta kesaksian ditegakkan melalui kritik eksternal, tiba giliran sejarawan untuk mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu (Sjamsuddin, 2007: 132, 134, 143).

### 3. Interpretasi

Interpretasi terhadap fakta sejarah yang berasal dari sumber sejarah lisan akan difokuskan kepada *mentifact* karena produk mulut hanya berupa suara, bukan benda. Fakta sejarah yang berisi informasi mengenai kerjasama, persaingan, dan konflik di berbagai bidang adalah *socifact* yang terucapkan oleh sumber sejarah lisan setelah diverifikasikan oleh sejarawan. Sejarawan bisa menafsirkan bentuk-bentuk kerjasama yang pernah terjadi (Priyadi, 2014: 98).

Pada tahap analisis, peneliti menguraikan sedetail mungkin ketiga fakta (*mentifact, socifact, dan artifact*) dari berbagai sumber atau data sehingga unsur-unsur terkecil dalam fakta tersebut menampakkan koherensinya. Penafsiran dalam metode sejarah menimbulkan subjektivitas sejarah, yang sangat sukar dihindari, karena ditafsirkan oleh sejarawan (*si subjek*), sedangkan yang objektif adalah faktanya. Penafsiran model sejarah tersebut

dapat diterapkan pada ilmu antropologi, seni pertunjukan, studi agama, filologi, arkeologi, dan ilmu sastra (Priyadi, 2011: 88-89).

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai bias subjektivitas. Sebagian itu benar, tetapi sebagian salah. Benar karena, tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur, akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya, subjektivitas penulis sejarah diakui, tetapi untuk dihindari. Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan (Kuntowijoyo, 1995: 100-101).

#### **4. Penulisan Sejarah (Historiografi)**

Peneliti menyajikan laporan hasil penelitian dari awal hingga akhir, yang meliputi masalah-masalah yang harus dijawab. Tujuan penelitian adalah menjawab masalah-masalah yang telah diajukan. Penyajian historiografi meliputi: pengantar, hasil penelitian, dan simpulan. Penulisan sejarah harus memperhatikan aspek kronologis, periodisasi, serialisasi, dan kausalitas (Priyadi, 2011: 92 ).

Pemikiran-pemikiran Sartono Kartodirdjo yang berkenaan dengan historiografi telah membuka cakrawala baru sejarah Indonesia dengan pendekatan multidimensional dan pendekatan struktural. Pendekatan multidimensional dimaksudkan untuk membedah sejarah Indonesia dengan menampilkan berbagai dimensi yang terintegrasikan dengan interdisipliner. Ilmu-ilmu bantu secara bersama-sama menanggung dalam penjelasan sejarah. Pendekatan struktural adalah pendekatan yang menggunakan konsep-konsep

ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya sehingga terwujud sejarah struktural. Konsep-konsep ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya harus terintegrasi dengan pendekatan interdisipliner (Priyadi, 2015: 116).

Dalam penulisan sejarah aspek kronologi sangat penting. Kalau dalam penulisan sosiologi “alur lurus” atau tidak menjadi masalah, tidak demikian halnya dengan sejarah. Demikianlah, misalnya, kita akan menulis “Perubahan Sosial di Semarang, 1950-1990”. Dalam penulisan sosiologi, angka tahun tidak penting, karena ilmu sosial biasanya berbicara masalah kontemporer. Dalam ilmu sosial, orang berfikir tentang sistematika, dan tidak tentang kronologi. Sedangkan, dalam sejarah perubahan sosial itu akan diurutkan kronologinya ((Kuntowijoyo, 1995: 102-103).

## **I. Sistematika Penyajian Hasil Penelitian**

Penyajian hasil penelitian terdiri dari :

BAB I, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis dan pendekatan, metode penelitian.

BAB II berisi tentang pembahasan mengenai lahirnya Pancasila dinarasikan dalam buku teks pelajaran sejarah KTSP 2006 dan Kurikulum 2013.

BAB III berisi tentang pembahasan mengenai tokoh–tokoh dalam perumusan Pancasila yang dinarasikan dalam buku teks pelajaran sejarah KTSP 2006 dan Kurikulum 2013.

BAB IV berisi tentang pembahasan mengenai proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dinarasikan dalam buku teks pelajaran sejarah KTSP 2006 dan Kurikulum 2013.

BAB V, berisi tentang kesimpulan dan saran penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

